

Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera

Titin Yuniartin

Institut Agama Islam Darussalam Ciamis Jawa Barat
ummiazy@yahoo.com

Abstract: *This paper discusses the political identity of Prosperous Justice Party (PKS). PKS is one of the parties based on Islam, but stands firmly in the auspices of the Unitary State of the Republic of Indonesia. PKS is born from harakah (movement), LDK-KAMMI-PK-PKS. The ideals of the Khilafah Islamiyah are always present in the ideals of the movement. Although in the auspices of plural and multicultural country, but the PKS still exists to adjust with the Republic of Indonesia. PKS political identity for some may seem gray. This is understandable, especially if we look at it from the perspective of incomplete Islamic understanding. The concept of caliphate of Islamiyah ala PKS is different from what is understood and developed in other harokah (movement). In essence, the Islamic caliphate that the PKS wants to uphold is international justice, international welfare, international harmony, and world prosperity. It starts from building prosperity, harmony, and national justice.*

Keyword: Politic Identity, Prosperous Justice Party, Taqiyah

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang identitas politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS adalah salah satu Partai yang berasaskan Islam, namun berdiri tegak dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PKS lahir dari *harakah* (gerakan), LDK-KAMMI-PK-PKS. Cita-cita Khilafah Islamiyah selalu ada dalam cita-cita gerakannya. Walau dalam naungan Negara yang plural dan multikultural, PKS tetap bereksistensi menyesuaikan dengan NKRI. Identitas politik PKS bagi sebagian pihak mungkin terkesan abu-abu. Hal ini bisa dimaklumi, terutama bila kita memandangnya dari perspektif pemahaman pemikiran keislaman yang belum utuh. Konsep khilafah Islamiyah ala PKS berbeda dengan apa yang dipahami dan dikembangkan dalam harokah-harokah lain. Pada intinya khilafah Islamiyah yang ingin ditegakkan PKS adalah keadilan internasional, kesejahteraan internasional, kerukunan internasional,

dan kemakmuran dunia. Hal ini dimulai dari membangun kesejahteraan, kemakmuran, kerukunan, keadilan nasional.

Kata kunci: Identitas Politik, Partai Keadilan Sejahtera, Taqiyah

Pendahuluan

Politik selalu merupakan pembahasan yang menarik untuk terus diperbincangkan. Pembahasan politik dalam Islam sudah dimulai sejak awal kelahiran Islam itu sendiri dan menjadi lebih intensif dilakukan sejak peristiwa *Tahkim* antara kelompok Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Isu-isu politik nampaknya menarik untuk dibahas hingga saat ini. (Nasution, 1974: 92)

Dalam penelitian ini, saya akan membahas tentang teologi politik Islam. Secara umum, politik dalam Islam atau teologi politik Islam memunculkan dua kutub pandangan yang bersifat ekstrim (Jonkennedi, 2012: 8). Pertama, kelompok yang berpendirian bahwa politik merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Kedua, kelompok yang berpendapat politik bukan sebagai bagian dari ajaran Islam. Kelompok pertama melahirkan konsep *din ad-daulah*. Kelompok kedua melahirkan konsep negara sekuler. Kesamaan militansi kedua kelompok ini memicu munculnya kelompok ketiga yang mencari jalan tengah, yakni negara dapat mengadopsi nilai-nilai ajaran agama, tanpa mendirikan negara agama. (Zainal, t.t: 1)

Menurut Munawir Sjadzali bahwa dalam mengkaji hubungan antara Islam dan politik (ketatanegaraan) perlu dijelaskan terlebih dulu apa yang dimaksudkan dengan sistem politik itu. Sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan Negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan; kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab itu (Sjadzali, 1991: 3)

Objek penelitian ini adalah salah satu partai politik Islam di Indonesia, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disingkat PKS). Ketertarikan saya untuk membahas identitas politik PKS berangkat dari adanya beberapa peneliti yang “menyangka” bahwa ideologi politik PKS, terkait

dengan komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terkesan abu-abu. Di satu sisi, partai ini mengakui Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi di sisi lain ia ingin menegakkan Khilafah Islamiyah. Konsep yang terakhir ini, menghendaki satu kepemimpinan terpusat sedunia, tanpa ada batas teritori negara-bangsa (*nation state*) (Wawancara dengan Ust Fadlulloh, 2017).

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, saya bermaksud untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya identitas politik PKS itu. Pembahasan dalam makalah ini terbagi menjadi beberapa pokok bahasan. Adapun pokok-pokok masalah yang akan saya bahas dalam makalah ini adalah: sekilas tentang PKS, identitas politik PKS, dan *taqiyah* politik PKS. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *library research* (Harahap, 2014: 68). Penelusuran dilakukan terhadap buku dan artikel jurnal ilmiah. Selain dari penelusuran pada buku dan artikel, saya juga mengamati beberapa tayangan rekaman audio-visual di laman www.youtube.com terkait tema yang sedang diangkat. Misalnya melihat tayangan lagu-lagu terkait harakah Partai Keadilan Sejahtera. Wawancara juga dilakukan melalui media sosial dengan beberapa kader militan milik Partai Keadilan Sejahtera.

Review Literatur

Berikut ini beberapa tulisan yang membahas hal yang berkaitan dengan Partai Keadilan Sejahtera, terkait ideologi politik atau gerakan dakwah politiknya.

Akh. Muzakki dalam tulisannya “Islamisme dan Politisasi Agama Model PKS Dalam Pilpres 2009” mengungkapkan bahwa dalam dekade terakhir ini, Islamisme sebagai konsep politik dan mungkin sebagai ideologi telah mendapat momentum kuat di Indonesia. Makalah ini berusaha untuk mengeksplorasi ekspresi dan aktualisasi Islamisme dengan meneliti perilaku politik Partai Keadilan dan Kesejahteraan (Partai Keadilan) Sejahtera / PKS) selama pemilihan presiden 2009. Muzakki sendiri sangat tertarik melihat penggunaan simbol dan ritus keagamaan oleh partai untuk kepentingan politik yang jelas dan berpendapat bahwa Islamisme telah dimanipulasi oleh PKS selama pemilihan tersebut sebagai wahana untuk mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu, masalah utama

yang dihadapi sebenarnya adalah gagasan tentang politisasi agama oleh partai politik yang mengklaim telah mewakili Islam dan ajaran mulia (Muzakki, 2010: 1).

Muslihudin dalam tulisannya “Model Pesantren Kader; Relasi Ideologis PP Husnul Khotimah dengan PKS, serta Artikulasinya dalam Kegiatan Kepesantrenan” membahas tentang beberapa lembaga pendidikan yang dapat dengan mudah dibaca sebagai lembaga pendidikan beraroma PKS. Ada sejumlah asumsi yang mendasari kesan tersebut; 1) pendiri sekolah tersebut dan pengelolanya adalah kader PKS, 2) mengusung simbol-simbol PKS, 3) mengajarkan Islam ala PKS, 4) menjadi basis perjuangan politik PKS. Lembaga pondok pesantren yang memberi kesan pesantren PKS adalah pesantren Khusnul Khatimah di Jalaksana Kuningan. Meskipun kelahiran pesantren ini mendahului kelahiran PKS, namun kesan yang tersimpan di benak masyarakat terhadap pesantren ini adalah pesantren PKS. Boleh jadi kesan tersebut dibangun oleh masyarakat ketika membaca fenomena hubungan Pesantren Khusnul Khotimah dengan Partai Keadilan Sejahtera. Dalam hal ini harus dibuktikan model hubungan antara partai politik PKS dengan pesantren Khusnul Khotimah sehingga menjadi karakteristik baru atau model baru pesantren di Indonesia, bahkan teori baru tentang pesantren di Indonesia. Dalam penelitian ini, yang sangat kuat adalah perjuangan Islamisasi ala timur tengah di Pesantren Khusnul Khotimah Kuningan Jawa Barat, dan proses *tarbiyah* yang dibangun sebagai gerakan politik PKS untuk ikut partisipasi dalam demokrasi di Indonesia (Muslihudin, 2013: 1).

Abu Rokhmad dalam tulisannya Dasar Negara dan *taqiyah* Politik PKS mengkaji relasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Pancasila sebagai dasar negara. PKS lahir setelah Pancasila diyakini sebagai perjanjian suci kebangsaan. Sikap PKS terhadap Pancasila sebagai dasar negara masih mengambang. Ia dipandang menyembunyikan maksud hati yang sebenarnya: antara menerima Pancasila atau menegakkan syariat Islam. Cita-cita menegakkan syariat Islam tersimpan dalam visi, misi, dan hati para kader PKS, yang akan dilakukan secara damai dan konstitusional (Rokhmad, 2014:1).

Tulisan saya di sini adalah ingin melanjutkan beberapa penelitian di atas terkait Identitas Politik PKS yang “terkesan” abu-abu. Oleh karena itu

saya menjelaskan dengan beberapa wawancara terhadap beberapa tokoh PKS.

Profil Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah nama sebuah partai Islam di Indonesia. Sebelum mentransformasikan diri menjadi PKS, PK adalah nama partai yang dibentuk tahun 1998. Nama PK berubah menjadi PKS, karena tidak memenuhi *electroral threshold*. PKS ini didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 9 Jumadil Awwal yang bertepatan dengan tanggal 20 April 2002. Partai ini berasaskan Islam. PKS adalah partai dakwah Islam. Dikatakan partai dakwah karena pembentukan partai ini memang berangkat dari niat untuk melakukan tugas dakwah di bidang politik (AD-ART PKS, 2009: 25). Partai ini mengusung ciri yaitu sebagai partai yang bersih, peduli dan profesional. Kantor pusat partai ini berkedudukan di Jakarta. Sebagai partai yang didirikan di Indonesia, PKS memiliki visi menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun misi partai ini adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhai Allah subhanahu wata'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (AD-ART PKS, 2009: 25)

Tujuan didirikannya PK Sejahtera, sebagaimana tertuang dalam AD/ART, adalah “Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. PK Sejahtera menyadari pluralitas etnik dan agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke, yang dilalui garis khatulistiwa di dalamnya. (Platform PKS, 2008: iv)

Masyarakat Madani yang dimaksud adalah masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara (Suroto, 2015: 671). Pengertian genuin dari Masyarakat

Madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang terikat dalam *ukhuwah Islamiyyah* (ikatan keislaman), *ukhuwah wathaniyyah* (ikatan kebangsaan), dan *ukhuwah basyariyyah* (ikatan kemanusiaan) dalam bingkai NKRI. Jadi sangat jelas posisi Partai Keadilan Sejahtera dalam wacana bentuk Negara atau hubungan antara agama-negara. Bentuk negara dan hubungan agama-negara yang realistik-obyektif untuk Indonesia dengan pluralitas dan keimanan penduduknya adalah Masyarakat Madani, NKRI Yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Dalam negara dijamin kebebasan pemeluknya untuk beriman secara tauhid, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara subyektif PK Sejahtera memiliki *hajm ma'nawi* (kapasitas moral), *hajm fikri* (kapasitas idealita), *hajm ijtima'i* (kapasitas sosialkemasyarakatan), *hajm ta'rsiri* (kekuatan pengaruh), *hajm siyasi* (kapasitas politik), sehingga dakwah mampu secara struktural memberikan pengaruh (melalui *public reason*). (Platform PKS, 2008: v)

PKS pada awalnya adalah Partai Keadilan (PK), yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998. PK lahir dari momentum euphoria reformasi setelah lengsernya Soeharto tahun 1998. Basis Partai ini adalah gerakan Tarbiyah model Ikhwanul Muslimin di Mesir. Tokoh utamanya adalah Hasan Al-Banna (Mawardi, 2013: 10). Gerakan Tarbiyah ini menurut Norma Permata, seperti dikutip oleh Muslihudin, adalah gerakan yang mengadopsi konsep Islamisasi secara gradual (*gradual Islamisation*), yaitu berawal dari individu ke dalam keluarga, ke dalam masyarakat, dan kemudian ke dalam politik. (Muslihudin, 2013: 9)

Menurut Pratama, seperti dikutip Muslihudin, seperti halnya Ikhwanul Muslimin, doktrin politik PKS berkembang dalam proses pengembangan sistem masyarakat Islam melalui tahapan-tahapan (*gradual*), sebagai berikut: pertama, *ta'sisi (the formation stage)*, yaitu mengawali pembentukan gerakan dakwah. Kedua, *tanzimi (the foundation stage)*, yaitu pengembangan organisasi melalui rekrutmen kader untuk mengembangkan jaringan organisasi, ketiga, *sya'bi (the socialization stage)*, yaitu mengawali gerakan dakwah dengan memperkenalkan aktifitas dakwah kepada publik yang lebih luas dan melakukan rekrutmen anggota secara terbuka. Keempat, *muassasi (the penetration stage)*, yaitu kegiatan partisipasi gerakan dakwah melalui proses pelembagaan politik

seperti pemilu. Kelima, *dawly (the government phase)*, yaitu di mana aktor dakwah menduduki posisi pemerintah. (Muslihudin, 2013:9-10)

Apabila melihat sejarah berdirinya PKS, kelahiran PKS dapat dibagi ke dalam tiga tahapan. *Pertama* fase dakwah kampus. Para aktivis umumnya usia muda yang bergerak dari dalam kampus (umumnya universitas umum) dan dalam skala terbatas di sekolah-sekolah dalam bentuk Rohani Islam (Rohis). Mereka mendirikan dan mengelola pengajian yang diwadahi dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut adalah sama, yakni memberikan pemahaman dasar-dasar Islam dengan penekanan pada penanaman *ghirah* (semangat) keislaman. *Kedua* adalah pelembagaan gerakan mahasiswa. Pada perkembangannya, LDK semakin berkembang terutama di kampus-kampus umum, dan beberapa kampus Islam namun hanya sedikit. Masjid-masjid kampus menjadi pusat kegiatan dakwah, dan dihadiri banyak mahasiswa untuk ikut serta dalam lingkaran kecil kajian agama (*halaqoh*). Sehingga pada pertemuan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK), beberapa aktivis LDK mengumumkan pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMMI). *Ketiga* adalah gerakan politik. Gerakan politik ini dimotori oleh para aktivis KAMMI, alumni LIPIA, alumni Saudi Arabia dan alumni Timur Tengah lainnya. (Rokhmad, 2013: 11-12).

Melihat tahapan dakwah PKS di atas, tidak berlebihan bila saya sepakat dengan pendapat Muzakki bahwa strategi yang sangat populer di lingkungan PKS adalah dari Islamisasi Kampus ke Islamisasi Negara. (Muzakki, 2010: 65). Dari politik kampus ke politik Negara. Sebuah strategi yang sangat tersusun rapi. Konsolidasi internal dengan penguatan akidah dan akhlak para kader dakwah kampus. Pembinaan rutin tiap mingguan (*liqo*), sebagai amunisi menghadapi tantangan luar. Aktivitas-aktivitas harian senantiasa dipelihara dan dipantau setiap minggunya oleh Sang Murobbi. Seperti sholat lima waktu harus dilakukan tepat waktu, tilawah al-quran minimal satu juz per hari, qiyamul lail, sholat dhuha, sedekah, silaturahmi, membaca buku Islami, membaca buku pengetahuan lain dan olahraga. Itu semua merupakan makanan ruhiyah, fikriyah dan jasadiyah. Seorang kader diharapkan memiliki fisik dan psikis yang kuat dan sehat sebagai modal dasar kekuatan tim. Karena, tim yang kuat berasal dari individu-individu yang kuat pula.

Pengarusutamaan keluarga juga merupakan agenda besar PKS. Keluarga adalah *basic* utama membangun sebuah Negara. Negara akan rapuh jika keluarga-keluarganya pun rapuh. Peran ayah dan ibu sangat dituntut dalam membentuk *jundi-jundiyah* (putra-putri) mereka, sehingga menjadi generasi harapan bangsa. Tradisi membawa anak-anak ikut demonstrasi adalah bagian dari mengajarkan perjuangan semenjak dini. Bahwa semangat berjuang itu harus diajarkan sejak dini, sehingga diharapkan di kemudian hari, anak-anak tersebut menjadi generasi yang militan. Dalam setiap kegiatannya pun PKS selalu melibatkan anak-anak hingga dewasa. Anak-anak dibiasakan bersosialisasi dengan banyak orang, melihat situasi dunia sekitar yang amat sangat rumit. Sehingga kelak di kemudian hari generasi PKS menjadi generasi yang tangguh dalam menjawab tantangan global.

Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera

Dalam kancah perpolitikan, setidaknya ada tujuh peranan yang PKS dermakan untuk Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan bentuk negara. Sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kaum Muslimin terhadap rumah besarnya yang bernama Indonesia, dan panggilan dakwah yang menjadi rahmat bagi semesta alam, PK Sejahtera bahu-membahu bersama entitas politik lainnya untuk mengisi pembangunan menuju Indonesia yang maju, kuat, aman, adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan cita-cita universal, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan Allah.

Kedua berkaitan dengan dinamika politik nasional, PK Sejahtera mendorong agar Indonesia Baru ke depan berada pada kondisi politik yang sehat dan dinamis, dimana terjadi pematangan dari kondisi transisi menuju konsolidasi demokrasi yang mantap, yang ditandai dengan terbuka lebarnya ruang berekspresi masyarakat dalam koridor hukum dan tertib sosial.

Ketiga, berkaitan dengan model demokrasi. Eksperimentasi politik di masa transisi saat ini ditandai dengan terbuka lebarnya ruang ekspresi dan ledakan partisipasi politik dalam bentuk

munculnya banyak partai politik, namun tetap dalam format sistem presidensial. Sejarah perpolitikan Tanah Air sejak era Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin di zaman Orde Lama, serta Demokrasi Presidensial di zaman Orde Baru, sampai hari ini di era Reformasi dengan praktek "Demokrasi Parlemen Multi Partai" memperlihatkan pergerakan bandul sejarah dari sistem liberal.

Keempat, berkaitan dengan sistem ketatanegaraan PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerintah mestilah efisien dan efektif dalam mengelola negara. Secara bertahap bersama tumbuhnya kekuatan negara, maka pemerintah mengambil posisi pada pengelolaan fungsi minimal negara, dan menyerahkan fungsi lainnya bagi partisipasi masyarakat.

Kelima, berkaitan dengan tata hubungan pemerintahan secara vertikal serta otonomi daerah, maka PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa hubungan ini dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan pusat secara lebih efektif sekaligus dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah melalui penguatan kelembagaan, pembinaan SDM, dan peningkatan kapasitas. *Keenam*, berkaitan dengan birokrasi, birokrasi yang bersih, peduli, dan profesional merupakan cermin akan "tubuh" bangsa ini sehari-hari yang merefleksikan ruh pengelolaan negara.

Ketujuh, PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, "hanya sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor". Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut (Platform PKS, 2008: 5-7).

Dalam Anggaran Dasar PKS, bahwa PKS ini adalah salah satu Partai di Indonesia yang berasaskan Islam, walaupun semua organisasi politik atau organisasi masyarakat seyogyanya berasaskan Pancasila (AD-ART PKS, 2009: 2) Ini yang menjadi pertanyaan beberapa peneliti. Menurut penelusuran saya, bahwa PKS ini memiliki kesamaan asas dan tujuan dengan salah satu organisasi gerakan jihad di Mesir yaitu Ikhwanul Muslimin.

Ikhwanul Muslimin (IM) adalah salah satu organisasi gerakan perlawanan di Ismailia Mesir. Ikhwanul Muslimin (disingkat IM) didirikan pada bulan Maret 1928 oleh Hasan al-Banna dan 6 pekerja buruh. Gerakan ini menyerukan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar membangun masyarakat yang sehat. IM bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. IM banyak terlihat gerakannya dalam pemberdayaan masyarakat. Mereka membantu fakir miskin, memberantas buta huruf, membangun sekolah dan rumah sakit. Karena gerakan sosial inilah akhirnya IM menyebar ke seluruh penjuru Mesir.

Menurut Muhtadi, seperti dikutip Muslihudin, meskipun PKS muncul dengan wajah yang sangat politik (partai politik), tetapi etos dasarnya sebenarnya adalah organisasi kemasyarakatan (gerakan tarbiyah) yang bergerak di bidang dakwah Islam sesuai dengan induk semangnya yaitu LDK yang ada di kampus-kampus. Etos dasar PKS memiliki warna yang khas karena lebih dipengaruhi oleh doktrin Islamisme. Islamisme adalah sebuah doktrin yang menyakini bahwa Islam memiliki seperangkat norma atau ajaran yang komprehensif dan unggul yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk ketertiban atau aturan sosial. Bagi kaum Islamis, aturan politik sosial yang ada harus diganti dengan norma atau ajaran yang didasarkan kepada tafsir tertentu atas ajaran Islam (Muslihudin, 2013: 11)

Sebagai partai yang lahir dari rahim gerakan tarbiyah, kader-kader PKS sudah terbiasa dalam mengkaji dan mendiskusikan teks-teks keagamaan tradisional. Dalam perkembangannya, PKS juga mengembangkan perspektif tarbiyah yang lebih luas (Farish, 2007: 1), meliputi *tarbiyyah nadzariyah* (pendidikan norma dan teori Islam), *tarbiyah ruhiyyah* (pendidikan moral dan etika), *tarbiyah maidaniyyah* (pendidikan praktek mobilisasi masa dan organisasi), *tarbiyah fikriyyah* (kajian pemikiran kritis, termasuk logika dan teori kritis), *tarbiyah harakiyyah* (pendidikan pengembangan organisasi dan training terkait mobilisasi partai politik).

Terkait dengan bahasan teologi PKS ini, PKS tidak berbeda dengan Ikhwanul Muslimin, yang memiliki lima slogan organisasi yaitu: Allah adalah tujuan kami, Al-Quran adalah konstitusi kami, Rasulullah adalah pimpinan kami, jihad adalah jalan kami, dan syahid adalah cita-cita kami (Yakin, 2016: 226).

Telaah saya, hal di atas senada dengan apa yang didengung-dengungkan PKS sebagaimana yang dinyanyikan oleh salah satu Grup Nasyid favorit PKS yakni Shoutul Harokah yang berjudul *Bingkai Kehidupan*. Syair lagu tersebut sebagai berikut:

Bingkai Kehidupan

*Ha hahaha hahaha hahaha
Haaa hahahaha hahahaha hahahaha*

*Mengarungi samudra kehidupan,
Kita ibarat para pengembara
Hidup ini adalah perjuangan,
Tiada masa tuk berpangku tangan*

*Setiap tetes peluh dan darah,
Tak akan sirna ditelan masa
Segores luka di jalan ﷻ,
Kan menjadi saksi pengorbanan*

*Allohu ghoyatuna
Ar Rosulu qudwatuna
Al Qur'anu dusturuna
Al Jihadu sabiluna
Al Mautu fi sabilillah, asma amanina*

*ﷻ adalah tujuan kami,
Rasulullah teladan kami,
Alqur'an pedoman hidup kami,
Jihad adalah jalan juang kami
Mati di jalan ﷻ adalah,
Cita-cita kami tertinggi*

*Mengarungi samudra kehidupan,
Kita ibarat para pengembara
Hidup ini adalah perjuangan,
Tiada masa tuk berpangku tangan*

Setiap tetes peluh dan darah,

*Tak akan sirna ditelan masa
Segores luka di jalan ﷲ,
Kan menjadi saksi pengorbanan*

*Allohu ghoyatuna
Ar Rosulu qudwatuna
Al Qur'anu dusturuna
Al Jihadu sabiluna
AlMautu fi sabilillah, asma amanina*

*ﷲ adalah tujuan kami,
Rasulullah teladan kami,
Alqur'an pedoman hidup kami,
Jihad adalah jalan juang kami
Mati di jalan ﷲ adalah,
Cita-cita kami tertinggi
Cita-cita kami tertinggi*

Bila kita telaah, dari syair lagu di atas yang saya beri tanda tebal dan miring sangat mirip dengan slogan Ikhwanul Muslimin. Saya berhipotesis bahwasannya PKS merindukan apa yang dirindukan Ikhwanul Muslimin, yakni tegaknya Khilafah Islamiyah. Hal ini diperkuat oleh beberapa pendapat para kader PKS, bahwa di dalam dada-dada para kader PKS sangat merindukan Khilafah Islamiyah.

Walau demikian, cita-cita PKS untuk menegakkan Khilafah Islamiyyah tersebut tidak kemudian membuat partai ini menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Partai ini cukup kontekstual menuangkan pemikiran-pemikiran politiknya sesuai dengan konteks keindonesiaan.

Menurut Ustadz Fadlullah, seorang kader militan PKS asal Banten, PKS sebagaimana IM sangat patriotis dan nasionalis (Wawancara dengan Ustadz Fadlullah dengan media WhatsApp pada tanggal 26 Desember 2017). Ketika ditanya tentang Pancasila, menurutnya, Pancasila dan UUD 1945 itu *habl mi al-naas* yang tidak bertentangan dengan *habl min Allah*, yakni Al-qur'an. Dan ketika saya tanya tentang asas PKS, ia selalu merujuk dan mengembalikan semua pendapatnya tentang pemikiran dan teori politik PKS kepada Al-quran.

Menurut Siti Mukhlisoh, seorang kader militan PKS asal Jakarta, Khilafah Islamiyah memang menjadi tujuan politik PKS. Itu sangat jelas dan tidak disembunyikan. Namun pemahaman tentang Khilafah Islamiyah PKS berbeda dengan harokah lain, apalagi dengan partai lain karena PKS lahir dari harokah. Menurutnya, ada semacam *phobia* dengan istilah Khilafah Islamiyah. Hal itu muncul karena opini filosofis yang dihembuskan oleh Barat. Yang perlu digaris bawahi, PKS itu partai politik lokal Indonesia, maka sistem pemikirannya pun lebih kepada keindonesiaan. Khilafah bagi PKS lebih kepada misi nilai-nilai seperti: kemanusiaan internasional, keadilan internasional, kesetaraan internasional, penegakkan hukum internasional (Wawancara dengan kader militan PKS Siti Mukhlisoh dengan media WhatsApp pada tanggal 24 Desember 2017).

Ketika ditanya tentang kepemimpinan internasional, ia jawab bahwa khilafah Islamiyyah termasuk di dalamnya. Baginya, mesti ada pemimpin untuk umat Islam, bahkan bukan hanya untuk Islam saja tetapi untuk dunia secara umum. Paradigma partai ini adalah *rahmatan lil 'aalamiin* (rahmat bagi seluruh alam semesta). Ketika saya tanya apakah PKS menerima konsep *nation state* (negara bangsa)? Menurutnya, intinya PKS tidak mempermasalahkan bentuk teknis sebuah pemerintahan suatu negara atau bahkan dunia. Yang menjadi tujuan utama partai ini, seperti halnya tujuan Islam, adalah keadilan internasional, kesejahteraan internasional, kerukunan internasional, dan kemakmuran dunia. Hal ini semua dimulai dari membangun kesejahteraan, kemakmuran, kerukunan, keadilan nasional.

Terkait dengan komitmen PKS terhadap Pancasila seperti yang sementara pengamat meragukan, saya tanyakan kepadanya apakah PKS berniat mengubah Pancasila sebagai dasar Negara dengan asas Islam? Ia menjawab, tidak sama sekali. Bagi PKS, Pancasila berkesuaian dengan nilai-nilai Islam. Sejarah terbentuknya bangsa ini dibangun oleh para ulama.

Mahardika Vika Widjaya, seorang kader militan PKS dari Bandung mengutarakan hal yang sama. Menurutnya, Pancasila juga mengambil dari Al-Qur'an. Karena yang merintis dan menyusun Pancasila juga para ulama. Namun, karena Indonesia bukan Negara Islam, jadi redaksinya

disesuaikan. Pancasila menurutnya adalah bagian dari mewujudkan tegaknya Khilafah Islamiyah bila benar-benar isi dan ajarannya diamalkan seluruh rakyat Indonesia. (Wawancara dengan kader militan PKS Mahardika Vika Widjaya 23 Desember 2017).

***Taqiyyah* Politik Partai Keadilan Sejahtera**

Taqiyyah (Bahasa Arab: تقيقت) memiliki makna perlindungan dengan maksud bahwa seseorang itu melindungi keselamatan dan kehormatan diri dan hartanya dari bahaya musuh dengan menyembunyikan sesuatu dan melahirkan apa yang berlainan dengan hakikat yang tersembunyi di dalam hati (Atabik, 2015: 344). Dengan kata lain, *taqiyyah* ialah tindakan berpura-pura atau *hipokrit* kerana terpaksa. Konsep *Taqiyyah* lebih sering dipakai di teologi syi'ah, namun menurut saya tidak ada salahnya bila kita menggunakan atau meminjam istilah tersebut dalam menilai dan melihat teologi PKS ini. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada anggapan bahwa PKS menyembunyikan visi dan misi sejatinya yaitu ingin menegakkan khilafah Islamiyyah—atau paling tidak, ingin mendirikan Negara Islam di Indonesia.

Terkait dengan *taqiyyah* politik PKS ini, Dhume seperti dikutip Abu Rokhmad, misalnya menggambarkan PKS sebagai gerakan gradual dan evolusioner untuk menegakkan Negara Islam di Indonesia. Bahkan ia menyamakan cita-cita politik PKS dengan Jama'ah Islamiyah (JI). Partai menurutnya hanyalah kedok konstitusional semata (Rokhmad, 2014: 3). Oleh karena itu, Steele bahkan mengingatkan publik untuk mengawasi agenda-agenda tersembunyi PKS yang bermain melalui isu-isu anti korupsi, tapi secara diam-diam maupun terbuka masih konsisten memperjuangkan nilai-nilai fundamentalistik.

Menanggapi pendapat dua peneliti di atas, untuk mendapatkan data yang lebih valid dan lebih meyakinkan, saya kemudian mencoba mewawancarai beberapa kader militan PKS.

Menurut salah seorang kader militan PKS, Khilafah Islamiyah itu memang merupakan cita-cita Partai. Ia bahkan adalah cita-cita seluruh Muslim dan berdirinya khilafah Islamiyyah adalah hal yang pasti terjadi, sesuai dengan hadits Rasul. Ia akan terjadi sebelum akhir zaman. Sementara Pancasila hanya menaungi Negara Indonesia. Tidak ada

saling mengganggu satu sama lain. Pada kekhalifahan ke-2 nanti semua masyarakat Muslim di dunia akan berada dalam naungan satu pemimpin seperti zaman Rasulullah kelak. Jadi sebenarnya Pancasila hanya berlaku di Indonesia saja. Sedangkan khilafah Islamiyah belum tentu pusat khalifahnyanya di Indonesia. Menurutnya, dasar Negara kita tidak harus Islam atau hukum Islam. Dan PKS sendiri tidak berniat mengubah dasar Negara di Negara kita yang plural dan multikultural ini. Yang pertama harus diubah itu adalah aqidah dan akhlaq.

Ketika saya bertanya tentang *taqiyyah* terhadap kader militan tersebut. PKS tidak mau dikatakan seperti itu. Karena konsep *taqiyyah* memang ada di teologi Syi'ah. Namun justru ungkapan yang disampaikan kader tersebut adalah PKS sedang ber-*taqiyyah* untuk keamanan dirinya. Mampu melebur di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan harapan dan cita-cita dalam dada-dada mereka adalah tegaknya Khilafah Islamiyah di muka bumi ini.

Kesimpulan dan Saran

Dari uraian di atas dapat saya simpulkan bahwa PKS adalah salah satu Partai yang berasaskan Islam, namun berdiri tegak dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PKS lahir dari *harakah* (gerakan), LDK-KAMMI-PK-PKS. Cita-cita Khilafah Islamiyah selalu ada dalam cita-cita gerakannya. Walau dalam naungan Negara yang plural dan multikultural, namun PKS tetap bereksistensi menyesuaikan dengan NKRI. Terbukti PKS dalam beberapa kali Pemilu bisa ikut serta dan duduk di parlemen.

Terkait dengan isu *taqiyyah*, menurut saya istilah tersebut sebenarnya tidak tepat disematkan kepada PKS karena apa yang menjadi cita-cita, visi, dan misi partai ini sangat jelas. Tidak ada yang disembunyikan. Dalam menyuarakan cita-cita khilafah Islamiyah, bagi PKS, tidak harus mengubah dasar Negara Pancasila, karena dalam Pancasila sudah termaktub cita-cita tegaknya Khilafah Islamiyah. Yang terakhir ini bisa menjadi kenyataan, apabila semua warga Indonesia bisa mengamalkan isi dan ajaran Pancasila.

Identitas politik PKS bagi sebagian pihak mungkin terkesan abu-abu. Hal ini bisa dimaklumi, terutama bila kita memandangnya dari perspektif pemahaman keislaman yang belum utuh. Sebenarnya niat Khilafah

Islamiyah PKS tidak disembunyikan, bahkan diungkapkan secara terang-terangan. Dalam dada seluruh kader-kader PKS mesti ada niat dan cita-cita mendirikan Khilafah Islamiyah.

Namun, konsep khilafah Islamiyah ala PKS berbeda dengan apa yang dipahami dan dikembangkan dalam harokah-harokah lain. Pada intinya khilafah Islamiyah yang ingin ditegakkan PKS adalah keadilan internasional, kesejahteraan internasional, kerukunan internasional, dan kemakmuran dunia. Hal ini dimulai dari membangun kesejahteraan, kemakmuran, kerukunan, keadilan nasional.

Akhir kata, saya menyadari bahwa makalah ini belum sempurna, perlu ada penelusuran lebih jauh lagi terkait tema ini. Misalnya, dengan mewawancarai narasumber yang lebih representatif yang bermain di elit politik.

Daftar Pustaka

- Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jakarta: 20 April 2002.
- Atabik, Ahmad (2015). Melacak Historitas Syi'ah (Asal Usul, Perkembangan dan Aliran-Alirannya). *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 03: 02.
- Fitriyah, Afidatul dan M. Y. Tiyas Tinuv (2013). Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu Legislatif 2009. *Jurnal Demokrasi&Otonomi Daerah*, 11:1.
- Harahap, Nursapia (2014). Penelitian Pustaka. *Jurnal Iqra'*, 08:01.
- Jonkenedi (2012). Gerakan Hizbut Tahrir dan Raelitas Politik Islam Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Komunika*, 06:01.
- Mawardi, Khalid (2013). Fundamentalisme dan Gerakan Politik Identitas. *Jurnal Komunika*, 07:01.
- MPP PKS (2008). Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, Cetakan 1.
- Muslihudin (2013). Model Pesantren Kader: Relasi Ideologis PP Husnul Khotimah dengan PKS serta Artikulasinya dalam Kegiatan Kepesantrenan. *Jurnal Holistik*, 14: 01
- Muzakki, Akh (2010). Islamisasi Dan Politisasi Agama Model PKS Dalam Pilpres 2009. *Jurnal Islamica*, 5: 1.

- Noor, Farish A, at. Al., (2007) *The Madrasa In Asia: Political Activism and Transnational Linkages*, ISIM Series on Contemporary Muslim Societies, Amsterdam University Press.
- Rahawarin, Zainal. Teologi Politik Islam. *Jurnal fakultas ushuluddin dan dakwah IAIN Ambon*.
- Rokhmad, Abu (2014). Dasar Negara Dan Taqiyah Politik PKS. *Walisongo*, 22: 1.
- Suroto (2015). Konsep Masyarakat Madani Di Indonesia Dalam Masa Postmodern (Sebuah Analitis Kritis). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 05:09.
- Yakin, Ayang Utriza (2016). *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, non Muslim, Poligami, dan Jihad*. Jakarta: Kencana.

Narasumber

- Wawancara dengan Ustadz Fadlullah, kader PKS militan, dengan media WhatsApp pada tanggal 26 Desember 2017
- Wawancara dengan Siti Mukhlisoh, divisi Kaderisasi DPC PKS Cakung Jakarta Timur, dengan media WhatsApp pada tanggal 24 Desember 2017
- Wawancara dengan Mahardika Vika widjaya, divisi Kewanitaan DPC PKS Parongpong Bandung Barat, dengan media WhatsApp pada tanggal 23 Desember 2017

